

**PENGAWASAN DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP  
DISTRIBUSI GAS ELPIJI 3 KG DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
TAHUN 2019**

**Oleh :Gilang Satrio**

Email : [gilangsatrio23@gmail.com](mailto:gilangsatrio23@gmail.com)  
**Dosen Pembimbing :Adlin, S.SosM.Si.**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya JL. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The government determines LPG gas as fuel to meet household needs for the future and the community must switch from kerosene to LPG gas. The use of LPG gas is intended to continuously reduce the use of kerosene fuel. In carrying out this policy, the government must regulate the distribution of LPG gas so that it is right on target use. The Office of UKM Cooperatives, Trade and Industry of Kuantan Singingi Regency in supervising the distribution of 3 Kg LPG refers to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 26 of 2009 concerning the Supply and Distribution of Liquid Petroleum Gas (LPG).*

*This study aims to describe the supervision of the Koperasi UKM, Industry and Trade Office of Kuantan Singingi Regency in the Distribution of 3 Kg LPG Gas in Central Kuantan District in 2019 and to explain the inhibiting factors of this supervision. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques by observation, literature study and interviews.*

*The result of this research is that the Department of UKM Cooperatives, Industry and Trade of Kuantan Singingi Regency sets performance planning standards in the form of a work program of supervision of retail prices, quantities, targets, quality of 3 Kg LPG. Supervision of cylinder circulation, storage, misuse of 3 Kg LPG gas. Supervising the distribution of hoses, regulators and accessories with SNI standards and conducting socialization. In the implementation of this supervision, several violations were found, such as the absence of a price board by the base, high retail prices, the distribution of 3 Kg LPG that was not right on target and the existence of a base that did not have a business license. Correction of deviations from the violation of the distribution of 3 Kg LPG gas by giving a warning or light sanction in the form of directions and appeals to violators of the 3 Kg LPG gas distribution rule.*

**Keywords:** *Supervision, Distribution, Trade, Industry, 3 Kg LPG Gas*

## A. PENDAHULUAN

Program konversi minyak tanah ke LPG ini dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Untuk menjaga program konversi minyak tanah ke LPG agar tidak terjadinya penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan maka salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg ke masyarakat, pengawasan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas LPG 3 Kg.

Kehadiran otonomi daerah merupakan angin segar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan ini berarti daerah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan Urusan Pemerintahan Pilihan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian sub bidang minyak dan gas bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai ke konsumen akhir di wilayah, termasuk pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi terhadap distribusi gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah.

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu pusat pengembangan di wilayah bagian Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mengalami kemajuan pembangunan yang pesat dan pertumbuhan masyarakat yang pesat pula dan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 48.368 jiwa dengan luas wilayah 270.74 Km<sup>2</sup>, saat ini Kecamatan Kuantan Tengah memiliki 26 pangkalan gas elpiji dikarenakan banyaknya jumlah konsumsi gas elpiji di Kecamatan Kuantan Tengah.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pangkalan LPG Tabung 3 KG Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019**

No	Nama Agen	Jumlah Pangkalan
1	PT. Laksamana Cahaya Andalas	5
2	PT. Valery Family Mandiri	9
3	PT. Bahtera Syamguna Abadi	6
4	PT. Dian Baru	6

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa data pangkalan LPG tabung 3 KG Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2019 mencapai 26 pangkalan LPG 3 Kg.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Realisasi Tabung Gas LPG 3 Kg/Bulan di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019**

No	Nama Agen	Jumlah Realisasi Tabung Gas LPG 3 Kg/Bulan
1	PT. Laksamana Cahaya Andalas	2.280
2	PT. Valery Family Mandiri	12.600
3	PT. Bahtera Syamguna Abadi	11.540
4	PT. Dian Baru	11.180
<b>Jumlah</b>		<b>37.600</b>

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Valery Family Mandiri merupakan realisasi tabung gas LPG 3 Kg terbanyak di kecamatan kuantan tengah dengan jumlah 12.600, selanjutnya PT. Bahtera Syamguna Abadi berjumlah 11.540, PT. Dian Baru 11.180 dan PT. Laksamana Cahaya Andalas berjumlah 2.280. Seharusnya dengan melihat Realisasi Penyaluran Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2019 seluruh warga masyarakat terlayani kebutuhan akan gas 3 Kg dengan baik.

**Tabel 1.3**  
**Harga Agen dan Eceran Gas LPG Tabung 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah**

No	Tabung Gas Elpiji	Harga Agen	HET
1	3 Kg	18.500	25.000
2	5 Kg	65.000	80.000
3	12 Kg	155.000	165.000

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Gas LPG 3 kilogram (Kg) yang diperuntukkan untuk kelompok miskin masih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Akibatnya, kuota gas LPG 3 Kg sering habis di tengah jalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan. Kelompok yang berhak pun dirugikan. kondisi tersebut disebabkan oleh distribusi tabung elpiji 3 kg yang bersifat terbuka. Artinya siapa saja bisa membeli, termasuk orang yang dikategorikan mampu sekalipun. Padahal di tabung elpiji sendiri sudah jelas-jelas ditulis, bahwa

produk tersebut hanya untuk masyarakat miskin.

Salah satu alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan terdapat beberapa penyimpangan dalam pendistribusian gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, dimana penyalur menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 23.000,- sampai Rp 25.000,- pertabung di Kecamatan Kuantan Tengah
2. Permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa masih belum sepenuhnya lengkap dan berfungsi dengan baik sarana dan prasarana yang ada pada agen gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah.
3. Pendistribusian gas elpiji 3 kilogram (kg) di Kecamatan Kuantan Tengah belum tepat sasaran. Seperti yang diketahui bahwa gas elpiji 3 kilogram (kg) hanya untuk masyarakat miskin. Namun banyak dari masyarakat yang mampu dan tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kilogram (kg) ikut membeli dan menggunakan gas tersebut.
4. Terdapat di beberapa penyalur yang tidak resmi tumbuh dan berkembang di Kecamatan Kuantan Tengah, penyalur tersebut akan dapat merugikan masyarakat Kuantan Tengah dari segi keberadaan, keamanan karena

keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah dan dapat menghambat dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2019?
2. Apa saja Faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi pada Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2019?

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Pengertian Pengawasan**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan

rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Menurut (Kadarman, 2012:159) pengawasan kerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

a) Menetapkan Standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

b) Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

c) Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi Penelitian yang dipilih penulis adalah

Kecamatan Kuantan Tengah, alasannya adalah karena terdapat beberapa permasalahan yang ditemui oleh penulis terkait pelaksanaan urusan pengawasan dan pendistribusiangan Elpiji 3 KG sebagaimana yang telah penulis sampaikan di latar belakang.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama:

- 1) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
- 2) Kasi Pengawasan Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
- 3) Kepala Sub Bagian Umum Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
- 4) Amkama, Slamet Hariyanto, Fadli, Dwi Gasindo, Byan Perkasa. Selaku pemilik panggalan gas LPG di Kecamatan Kuantan Tengah.

Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Pengawasan dan pendistribusiangan gas Elpiji 3 Kilogram dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
2. Data dari Pangkalan gas Elpiji 3 Kilogram yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah
3. Data Gambaran Umum Penelitian dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan adalah “orang-dalam” pada latar penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dari pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2019**

Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg ke masyarakat agar tidak terjadinya penyimpangan pendistribusian gas LPG 3 Kg. Di Pusat Kementrian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, pengawasan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg.

##### **1. Menetapkan Standar**

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang

pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, biaya, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Rencana kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian di atas dapat diketahui bahwa bidang perdagangan memiliki program prioritas “Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tataniaga Subsidi LPG 3 Kg” dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 85.000.000, dengan kuota yang ditargetkan yaitu 80 pedagang.

##### **2. Mengukur Kinerja**

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur kinerja pelaksanaan sampai dengan mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan untuk menjalankan pelaksanaan program pengawasan. Menurut Kadarman (2001) dalam proses pengawasan untuk mengukur kinerja terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pelaksanaan Kinerja
- b. Evaluasi Kinerja

##### **a. Pelaksanaan Kinerja**

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 Kg

berdasarkan “Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi dengan Nomor : 510/Kopdagrin-DAG/VI/2019/408 Tentang Konsumen Penggunaan LPG 3 Kg Melakukan Pengawasan” sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap ketetapan harga eceran gas LPG 3 kg, jumlah, sasaran, dan mutu dari gas LPG 3 kg.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
4. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

#### **b. Evaluasi Kinerja**

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan evaluasi merujuk kepada indikator pencapaian kinerja yang telah ditetapkannya, baik itu input, proses, output, outcome, benefit dan impactnya, dan pula capaiannya. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pendistribusian LPG 3 Kg sudah cukup baik. Dalam artian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan tugasnya pada bidang perdagangan.

### **3. Memperbaiki Penyimpangan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan upaya perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg di Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan beberapa upaya penertiban atas dasar aturan yang telah diterbitkan, salah satunya yaitu :

- a) Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor : 510/Kopdagrin-DAG/VI/2019/408 Tentang

Konsumen Penggunaan LPG 3 Kg.

- b) Keputusan Bupati Nomor: KPTS.359/XI/2015 Tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Surat Edaran Dinas Kopdagrin Kuansing Nomor : 444/KOPDAGRI-Dag/VI/2019 Tentang Pemanggilan Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Kuantan Singingi.
- d) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: /Kpts/Kopdagrin-Sekr/II/2019 Tentang Revisi Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tataniaga Subsidi LPG 3 Kg, Pupuk dan BBM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan penemuan penyimpangan oleh Dnas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat bahwa ada beberapa penyimpangan seperti pangkalan yang tidak mencantumkan harga tertinggi eceran, pangkalan memberikan harga yang terlalu tinggi, pendistribusian tidak tepat sasaran dan ditemukannya pangkalan yang tidak memiliki izin usaha. Dalam hal tersebut Dnas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi memberikan teguran berupa pengarahannya. Selain itu pangkalan yang tidak memiliki izin usaha masih

diberikan kesempatan untuk mengurus izin usaha yang berlaku.

### **Faktor Penghambat Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melakukan Pengawasan Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis merangkum beberapa faktor penghambat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Melakukan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019. Adapun faktor penghambat dalam Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor Internal**

- a. Masih kurangnya anggaran Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sehingga pelaksanaan pengawasan serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan menjadi terhambat pelaksanaannya karena terbatas biaya operasional.
- b. Kurangnya koordinasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersama instansi terkait seperti PT. Pertamina dan Satpol PP.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Pelaksanaan Sosialisasi oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg belum sepenuhnya diikuti oleh para agen dan pangkalan LPG 3 Kg.
- b. Kurangnya kesadaran dari para pangkalan dan masyarakat dalam menggunakan LPG 3 Kg.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Distribusi Gas Elpiji 3 KG di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengawasan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan berdasarkan standar perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun program kerja dari penetapan standar perencanaan tersebut berupa pengawasan terhadap harga eceran, jumlah, sasaran, mutu LPG 3 Kg. Pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan, penyalahgunaan gas LPG 3 Kg. Pengawasan terhadap peredaran selang, regulator dan aksesoris berstandar SNI serta melakukan sosialisasi.

- b. Pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja merupakan indikator pengukuran kinerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg. Dari pelaksanaan pengawasan tersebut ditemukan beberapa pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 Kg seperti tidak adanya papan harga oleh pangkalan, harga eceran yang tinggi, pendistribusian LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dan adanya pangkalan yang tidak memiliki izin usaha.
- c. Perbaikan penyimpangan dari pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 Kg oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dengan memberikan teguran atau sanksi ringan yang berupa pengarahan dan himbauan kepada pelanggar aturan pendistribusian gas LPG 3 Kg tersebut.

### 2. Saran

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg di Kecamatan Kuantan Tengah, hendaknya Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya melakukan koordinasi bersama pihak penegakan peraturan daerah yaitu Satpol PP dan memberikan sanksi tegas kepada pangkalan yang tidak mengikuti arahan dan aturan yang telah ditetapkan.

- b. Melakukan koordinasi yang baik oleh agen, pangkalan serta melakukan pendekatan yang harmonis kepada masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah agar masyarakat dapat berpartisipasi membantu terselenggaranya pendistribusian gas LPG 3 Kg dengan baik.
- c. Melakukan penagihan atas data penjualan oleh pangkalan LPG 3 Kg setiap bulan. Hal ini dilakukan agar Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dapat mengetahui kemana saja dan kepada siapa gas LPG 3 Kg tersebut dijual atau didistribusikan. Dengan begitu pangkalan tidak sembarang dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg dan pendistribusian LPG 3 kg dapat tersalur tepat pada sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adlin. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada
- Hani, Handoko. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rafika Aditam

Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo

Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

M. Manulang. 1997. *Dasar-Dasar Management*. Jakarta: Garaha Indonesia

Sarwato. *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Graha Indonesia

Soejito, Irwan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Rineke Cipta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sujamto. 1988. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Jakarta: Bina Aksara

Victor, M. Situmorang, Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta

Yusron. 2018. *Beragam Praktek Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher

### Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
- Keputusan Bupati Nomor: KPTS.359/XI/2015 Tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Kuantan Singingi
- Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: /Kpts/Kopdagrin-Sekr/II/2019 Tentang Revisi Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tataniaga Subsidi LPG 3 Kg, Pupuk dan BBM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019
- Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor: 510/Kopdagrin-DAG/VI/2019/408 Tentang
- Konsumen Penggunaan LPG 3Kg
- Surat Edaran Dinas Kopdagrin Kuansing Nomor : 444/KOPDAGRI-Dag/VI/2019 Tentang Pemanggilan Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Kuantan Singingi
- Jurnal :**
- Bayu Anggara, Syapril Abdullah. (2017). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru*. PUBLIKA, Vol. 3, No.2
- Wawan Gunawan , Jauhar Arifin , Yuzan Noor. (2020). *Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong*. JAPB : Vol. 3, No. 2